

STRATEGI KOMUNIKASI KEPALA DESA DALAM UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK HORIZONTAL JAMA'AH SALAFI DI DESA GENTENG WETAN

Ainur Rofiq¹, Ahmad Irfan Ilhami²

Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi, Indonesia

e-mail: ¹ibrozia@gmail.com, ²ilhamarju@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to find solutions related to the right village head strategy so that conflicts with salafi worshipers in Genteng Wetan Village, and empowering salafi worshipers so that conflicts with the community in Genteng Wetan Village do not occur. The research method used is qualitative with the process of data collection, data reduction, data presentation and data verification. The results of this study indicate that the village head, realising the escalation of conflict that could occur, took the initiative to initiate communication with the wahabi salafi congregation as a first step in solving this problem. The village head also proposed that the salafi wahabi congregation and the local community together find a solution that can respect the differences in views, while still maintaining harmony in the village. The communication patterns used by the village head are primary communication patterns, secondary communication patterns and linear communication patterns.

Keywords: *Communication, Horizontal conflict, Salafi congregation*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah Menemukan solusi terkait strategi kepala desa yang tepat agar konflik dengan jamaah salafi di Desa Genteng Wetan, dan Memberdayakan jamaah salafi agar konflik dengan masyarakat di Desa Genteng Wetan tidak terjadi. Metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala desa, menyadari eskalasi konflik yang dapat terjadi, berinisiatif untuk memulai komunikasi dengan jamaah salafi wahabi sebagai langkah awal dalam menyelesaikan masalah ini. Kepala desa juga mengusulkan agar jamaah salafi wahabi dan masyarakat lokal bersama-sama mencari solusi yang dapat menghormati perbedaan pandangan, sambil tetap menjaga keharmonian di desa. Pola komunikasi yang dilakukan kepala desa yaitu pola komunikasi primer, pola komunikasi sekunder dan pola komunikasi linier.

Kata Kunci: *Komunikasi, Konflik horizontal, Jamaah Salafi*

Accepted: October 17 2023	Reviewed: November 13 2023	Published: November 30 2023
------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

A. Pendahuluan

Jamaah Salafi adalah suatu gerakan keagamaan yang bermula dari Arab Saudi dan menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Gerakan ini didasarkan pada pemahaman literalistis terhadap ajaran Islam, yang didasarkan pada pemahaman Salafus Shaleh atau para pendahulu umat Islam pada masa awal (Juditha, 2020). Mereka berkeyakinan bahwa pemahaman agama yang benar hanya bisa didapatkan dengan mengembalikan praktik-praktik keagamaan seperti yang dilakukan oleh para Salafus Shaleh, dan menolak adanya perkembangan atau interpretasi baru yang tidak sesuai dengan pemahaman Salafus Shaleh (Illah & Hermawan, 2022).

Jamaah Salafi juga menekankan pada praktik keagamaan yang sederhana dan menolak praktik-praktik yang dianggap bidaah atau inovasi dalam agama. Mereka sering mengutamakan studi dan pengamalan ajaran agama secara individual, dan menganggap organisasi dan kelompok keagamaan tradisional sebagai tidak cukup murni dalam pengamalan agama (Warsah, Avisia, & Anrial, 2020).

Di Indonesia, gerakan Salafi memiliki pengaruh yang cukup signifikan, dan muncul dalam bentuk pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan (Azeharie, 2015). Meskipun demikian, gerakan Salafi juga menuai kritik dan kontroversi, terutama karena pandangan mereka yang sering dianggap keras dan intoleran terhadap kelompok-kelompok keagamaan lain yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Konflik horizontal agama adalah konflik yang terjadi antara kelompok atau individu yang berasal dari agama yang berbeda di dalam satu wilayah atau negara yang sama (Utami, 2016). Konflik ini sering terjadi akibat perbedaan agama, keyakinan, atau praktik keagamaan antara kelompok-kelompok yang berbeda.

Konflik horizontal agama bisa memicu kekerasan dan menyebabkan kerusakan sosial, seperti diskriminasi, segregasi, atau bahkan genosida. Karena itu, konflik horizontal agama merupakan masalah yang kompleks dan perlu penanganan yang serius dari pemerintah, masyarakat, dan organisasi internasional untuk mencegahnya terjadi atau menyelesaikannya dengan cara yang damai dan adil (Lampe, 2018). Permasalahan antara jamaah Salafi dengan warga lokal di Desa Genteng Wetan terkait dengan konflik keagamaan yang terjadi di daerah tersebut. Konflik ini dimulai sejak beberapa tahun yang lalu, ketika jamaah Salafi mulai aktif di Desa Genteng Wetan dan mendirikan beberapa pesantren Salafi.

Jamaah Salafi memiliki pemahaman keagamaan yang berbeda dengan mayoritas warga Desa Genteng Wetan yang mayoritas beragama Islam. Beberapa ajaran dan praktik Salafi dianggap kontroversial oleh warga lokal, seperti pendekatan mereka terhadap ritual-ritual keagamaan seperti ziarah kubur atau penggunaan gambar dalam pembelajaran agama (Susilawati & Zikri, 2022).

Kehadiran jamaah Salafi di Desa Genteng Wetan dianggap mengganggu kehidupan sosial dan budaya masyarakat lokal. Beberapa warga khawatir bahwa ajaran Salafi akan mengancam tradisi lokal, seperti seni dan budaya tradisional. Jamaah Salafi di Desa genteng Wetan dianggap mengancam keberadaan organisasi Nahdlatul Ulama (NU), yang merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia dan memiliki banyak pengikut di Banyuwangi. Kedua kelompok ini memiliki perbedaan pandangan dan sering terjadi konflik antara keduanya. Konflik ini telah menimbulkan ketegangan di antara kedua kelompok dan memerlukan penyelesaian yang tepat untuk menjaga keharmonisan antara jamaah Salafi dengan warga lokal di Banyuwangi. Salah satu solusinya adalah dengan meningkatkan dialog antara kedua belah pihak untuk saling memahami dan menghargai perbedaan agama dan kebudayaan yang ada.

Gerakan Salafi memiliki pengaruh yang cukup signifikan, dan muncul dalam bentuk pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan (Tahir, 2023). Meskipun demikian, gerakan Salafi juga menuai kritik dan kontroversi, terutama karena pandangan mereka yang sering dianggap keras dan intoleran terhadap kelompok-kelompok keagamaan lain yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. konflik antara jamaah Salafi dan masyarakat lokal, termasuk dengan kepala desa, telah terjadi dalam beberapa kasus. Konflik ini terkadang terjadi karena perbedaan interpretasi terhadap ajaran agama, atau karena pandangan yang berbeda terhadap praktik keagamaan.

Kepala desa sebagai pemimpin lokal memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di wilayahnya. Pola komunikasi yang baik antara kepala desa dan jamaah Salafi dapat membantu mengurangi ketegangan dan meningkatkan pemahaman yang saling menguntungkan (Lestari, 2019). Dalam penyelesaian konflik dengan jamaah Salafi, kepala desa perlu memiliki pemahaman yang baik tentang pandangan dan praktek keagamaan jamaah Salafi. Kepala desa juga perlu memahami bahwa jamaah Salafi cenderung menolak cara-cara tradisional penyelesaian konflik, dan memilih untuk menyelesaikan konflik secara independen atau menggunakan penyelesaian alternatif.

Oleh karena itu, pola komunikasi kepala desa dalam penyelesaian konflik dengan jamaah Salafi harus dilakukan dengan cara yang menghormati nilai-nilai keagamaan yang dipegang oleh jamaah Salafi (Nurdiansyah, 2017). Kepala desa harus memastikan bahwa komunikasi yang dilakukan tidak menyinggung atau merendahkan pandangan keagamaan jamaah Salafi. Selain itu, kepala desa juga perlu melakukan dialog yang terbuka dan transparan dengan jamaah Salafi, dan berupaya untuk mencari kesepakatan yang saling menguntungkan. Pola komunikasi

yang efektif juga harus dilakukan secara berkelanjutan untuk mencegah terjadinya konflik yang lebih besar di masa depan.

Berdasarkan Pendapat dari Lasswell tentang proses komunikasi yang digunakan dalam kehidupan dibagi menjadi dua proses yaitu komunikasi primer dan komunikasi sekunder (Lasswell, 1948). Proses komunikasi primer merupakan kegiatan penyampaian pendapat dari seseorang kepada orang lain dengan menggunakan symbol tertentu yang digunakan sebagai alat penyampaian. Symbol sebagai alat bantu untuk proses komunikasi menggunakan pesan Bahasa (*verbal*) maupun gesture (*non verbal*) yang dapat dimaknai sebagai pikiran dan perasaan penyampai kepada pendengar. Proses komunikasi sekunder adalah proses penyampaian pendapat dengan alat bantu media yang digunakan untuk menyambung komunikasi dari penyampai kepada pendengar.

Penyampai pesan menggunakan media tambahan dalam menyatakan pesan komunikasi karena jumlah komunikan yang banyak dan jangkauan yang luas. Cara penyampaian komunikasi ini dengan menggunakan surat kabar, televisi, media social hingga film. Proses komunikasi sekunder lebih banyak menggunakan media massa dalam penyampaian komunikasinya.

Berdasarkan pendapat Lasswell komunikasi memiliki 5 unsur yang saling memiliki ketergantungan satu dengan yang lain (Lasswell, 1948), yaitu Sumber adalah subjek yang memiliki inisiatif atau kebutuhan akan komunikasi. Pesan adalah semua hal yang disampaikan oleh sumber kedua sebagai penerima. Pesan menjadi symbol verbal atau non verbal yang mewakili pendapat maupun perasaan pada sumber lain. Saluran atau media yaitu sarana yang digunakan untuk menyampaikan pemikiran komunikator kepada komunikan. Penerima (*finder*) yang juga sering disebut target (*goal*), komunikator (*communiicatee*), penyimpan (*decoder*) atau kalayak (*audience*), pendengar (*listener*), penafsir (*interpreter*), yakni orang yang mendapatkan pesan dari sumber. Efek yaitu perihal apa yang berubah dari penerima pesan setelah mendapatkan pesan dari komunikator. Misalnya penambahan ilmu pengetahuan dan lain-lain.

Ada banyak jenis model komunikasi dan bagian dari proses komunikasi, sehingga dapat ditemukan model yang sesuai dengan kebutuhan dan mudah digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pola komunikasi identik dengan proses komunikasi karena pola komunikasi merupakan komponen dari prosedur komunikasi. Proses komunikasi terdiri dari berbagai macam kegiatan yang berpusat pada pengiriman dan penerimaan pesan. Melalui proses komunikasi, akan muncul berbagai pola, model, bentuk, dan bahkan potongan-potongan kecil yang memiliki hubungan langsung dan kuat dengan proses komunikasi itu sendiri. kategori gaya komunikasi, antara lain gaya pengenalan, sekunder, linier, dan sirkuler. Gaya

komunikasi ini didasarkan pada model sederhana yang dikembangkan oleh Aristoteles, yang mempengaruhi karya ilmuwan politik Amerika, Harold D. Lasswell, yang pada tahun 1984 mengembangkan model komunikasi yang dikenal dengan formula Lasswell (Lasswell, 1948).

Pola komunikasi primer merupakan sebuah metode untuk menyampaikan pikiran seseorang kepada orang lain melalui komunikasi, dengan menggunakan simbol sebagai media atau mata uang. Dalam pola ini, dua jenis komunikasi yang digunakan adalah verbal dan nonverbal. Pola komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan dengan menggunakan media kedua setelah media awal terbentuk melalui penggunaan lambang media pertama. Komunikator menggunakan kedua bentuk media ini karena keduanya memberikan akses kepada sejumlah besar orang di wilayah geografis yang luas. Pola Komunikasi Linear. Dalam konteks ini, kata linear memiliki makna siklus yang bergerak dari satu titik ke titik lainnya dalam satu garis lurus; yaitu, seorang komunikator mengirimkan pesan kepada komunikator lain pada satu titik yang berfungsi sebagai terminal. Oleh karena itu, dalam proses komunikasi ini, interaksi tatap muka merupakan hal yang lazim, namun bentuk komunikasi berbasis media juga terdapat dalam komunikasi ini. Pola Komunikasi Sirkular. Dalam arti harfiah, "sirkular" merujuk pada sesuatu yang berbentuk bola, seperti bola atau kerucut, atau apa pun yang berbentuk keliling. Dalam proses melingkar ini, yang dikenal sebagai umpan balik atau gema, komunikator menerima gelombang aktivitas dari komunikan (Littlejohn & Foss, 2009).

Komunikasi organisasi internal mengacu pada pertukaran pesan antara karyawan untuk kepentingan keseluruhan, seperti antara manajemen tingkat atas dan bawah atau antara tingkat manajemen yang berbeda. Proses komunikasi internal ini dapat berupa komunikasi individu atau kelompok. Dan komunikasi dapat berupa langkah pertama dalam rantai komunikasi yang lebih panjang atau sebagai langkah lanjutan (menggunakan media massa) (West, Turner, & Zhao, 2010).

Permasalahan yang muncul antara jamaah salafi dengan warga NU sering terjadi di masyarakat. Konflik yang terjadi di Dusun Cangaan Desa Genteng Wetan menjadi salah satu konflik yang muncul di permukaan. Kepala desa Genteng Wetan selaku pemimpin desa selalu berkomunikasi dengan warga agar tidak sampai terjadi kekerasan dalam penyelesaian konflik tersebut. Strategi Komunikasi ini yang menjadi dasar penelitian ini agar konflik horizontal antara jamaah salafi dengan warga masyarakat yang mayoritas Nahdliyin dapat memiliki batasan-batasan agar tidak saling menyinggung satu sama lain. Tujuan penelitian ini adalah Menemukan solusi terkait strategi kepala desa yang tepat agar konflik dengan jamaah salafi di

Desa Genteng Wetan, dan Memberdayakan jamaah salafi agar konflik dengan masyarakat di Desa Genteng Wetan tidak terjadi.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Genteng Wetan Kecamatan genteng Kabupaten Banyuwangi. Difokuskan pada wilayah yang memiliki konflik dengan jamaah salafi di Kecamatan Genteng. Jenis penelitian kualitatif ini menggunakan metode penelitian deskriptif, menjelajahi merupakan studi pendahuluan dari suatu studi yang sifatnya sangat luas (Yin, 2009). Dalam penelitian eksplorasi menjadi sangat penting karena menghasilkan hasil Letakkan dasar yang kuat untuk penelitian lebih lanjut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif untuk dapat Memahami fenomena dalam konteks sosial dengan deskripsi secara alamiah dan gambaran tentang masalah sosial seseorang dari perspektif perilaku. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat di Desa Genteng wetan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain seperti laporan, jurnal, buku, atau hasil penelitian lain yang telah dilakukan oleh orang atau institusi lain. Data sekunder dapat digunakan untuk memperkuat analisis atau sebagai bahan referensi dalam penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen maupun arsip yang mendukung penelitian ini.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Teknik analisis data interaktif Miles dan Hubberman (Hubberman & Miles, 1994). Yang terbagi kedalam empat tahap yang yakni: tahap pertama adalah dengan pengumpulan data. Data yang dikumpulkan dari hasil wawancara yang dilakukan kepada kepala desa yang berada di Kabupaten Banyuwangi, tahap kedua dilanjutkan dengan reduksi data. Proses ini dilakukan dengan memfokuskan pada pemilihan data, penyederhanaan data, pembuatan abstraksi hingga transformasi data mentah yang kemudian dilakukan proses pengolahan sesuai dengan kebutuhan dan fokus penelitian. Proses reduksi data ini dilakukan pada saat proses pengumpulan data masih dilakukan. Pada tahap ini juga dilakukan pengkodean, pembuatan ringkasan hingga membuat bagian-bagian yang digunakan dalam analisis sehingga kesimpulannya dapat diverifikasi, tahap ketiga adalah penyajian data. Penyajian data ini ditampilkan dengan penjabaran uraian singkat dalam bentuk deskripsi. Proses ini bertujuan untuk memahami proses yang terjadi dan merencanakan Tindakan selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan, tahap terakhir adalah dengan melakukan verifikasi dan pembuatan kesimpulan. Asumsi dasar dan kesimpulan awal yang dikemukakan di awal masih bersifat sementara dan akan terus berubah selama proses pengumpulan data masih dilakukan. Kesimpulan yang dituliskan harus

didasarkan pada bukti-bukti yang ditemukan dilapangan sehingga kesimpulan menjadi kredibel.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

a. Strategi Komunikasi Kepala Desa Dalam Penyelesaian Konflik Dengan Jamaah Salafi Di Desa Genteng Wetan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Genteng Wetan, Bapak H. Sukri, terungkap bahwa kepala desa memiliki peran utama dalam tatanan pemerintahan desa. Ia memegang peran sentral yang sangat penting dalam menjaga stabilitas serta harmoni di kalangan masyarakat. Bapak Sukri menjelaskan bahwa peran ini mencakup tugas-tugas penting dalam menangani berbagai konflik yang mungkin muncul di desanya. Menurut beliau, kepala desa memiliki wewenang yang luas untuk meredakan dan mengatasi konflik, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Dalam konteks konflik vertikal, kepala desa berperan sebagai mediator antara masyarakat dan pihak otoritas yang lebih tinggi. Sementara itu, dalam situasi konflik horizontal, kepala desa menjadi fasilitator dialog antara berbagai kelompok masyarakat yang terlibat. Bapak Sukri juga menekankan pentingnya kemampuan komunikasi dan negosiasi yang kuat dalam menyelesaikan konflik, serta kepala desa harus memiliki pemahaman mendalam tentang dinamika masyarakat desa dan potensi konflik yang mungkin muncul. Kesemuanya ini, menurut Bapak Sukri, bertujuan untuk menjaga keamanan, kesejahteraan, dan kedamaian di Desa Genteng Wetan.

Berikut wawancara yang kami lakukan dengan Bapak H. Sukri selaku kepala desa Genteng Wetan (Sukri, 2023b):

“Sebagai kepala desa, saya memiliki wewenang yang luas untuk mengatasi konflik yang mungkin muncul di desa kami. Dalam hal konflik vertikal, yaitu antara masyarakat dengan pihak otoritas di atas kami, saya berperan sebagai perantara. Saya merasa penting untuk mendengarkan semua pihak yang terlibat, memahami masalah yang muncul, dan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak terkait.”

Konflik vertikal sering kali muncul akibat perbedaan pandangan atau kepentingan antara masyarakat dengan pihak pemerintah atau otoritas tingkat di atasnya. Kepala desa menjadi mediator penting dalam memfasilitasi dialog, mencari solusi bersama, dan menghindari eskalasi konflik yang dapat merugikan kedua belah pihak. Di sisi lain, konflik horizontal dapat terjadi antara berbagai kelompok masyarakat di dalam desa. Kepala desa memiliki peran krusial dalam mengatasi perbedaan akidah dalam hal ini terjadi penolakan ajaran salafi wahabi di Dusun Cangaan Desa Genteng Wetan(Sukri, 2023b).

“Sebagai kepala desa, saya menyadari bahwa perbedaan akidah atau pandangan keagamaan dapat menjadi pemicu konflik di masyarakat. Dalam hal ini, penolakan terhadap ajaran salafi wahabi di Dusun Cangaan memerlukan perhatian serius. Kami berusaha untuk meredakan ketegangan dengan pendekatan dialog terbuka. Saya mengundang berbagai pihak yang terlibat dalam perbedaan pandangan tersebut untuk berbicara secara terbuka dan saling mendengarkan. Kami mencoba untuk menemukan titik-titik persamaan dan mengedepankan pemahaman yang inklusif tentang agama.”

Kemampuan kepala desa dalam menyelesaikan konflik tidak terbatas pada pengetahuan hukum dan regulasi, tetapi juga sangat tergantung pada keterampilan komunikasi dan negosiasi yang handal. Melalui keterampilan ini, kepala desa dapat memahami akar permasalahan yang mendasari konflik, sehingga ia dapat mengidentifikasi solusi yang mampu meredakan ketegangan. Kepala desa yang mampu berkomunikasi dengan baik dapat mendengarkan dengan empati dan memahami berbagai sudut pandang yang ada. Dengan membangun saluran komunikasi yang terbuka, ia dapat membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk berbicara dengan jujur dan terbuka.

Keterampilan negosiasi yang baik memungkinkan kepala desa untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pencarian solusi bersama. Dalam proses ini, ia dapat merangkul perbedaan pandangan dan mencari titik temu yang menguntungkan semua pihak. Dengan pendekatan komunikasi dan negosiasi yang baik, kepala desa bisa meminimalkan risiko eskalasi konflik yang dapat merugikan masyarakat. Ia dapat mencegah konflik menjadi semakin rumit dan berbahaya, serta menghindari konsekuensi negatif dalam jangka panjang.

Kepala desa yang menguasai keterampilan ini juga dapat memastikan bahwa solusi yang diajukan tidak hanya memihak satu pihak, tetapi menguntungkan seluruh masyarakat. Dengan membawa semua pihak terlibat menuju persetujuan yang saling menguntungkan, ia dapat menciptakan kedamaian dan harmoni dalam lingkungan desa. Secara keseluruhan, kemampuan kepala desa dalam berkomunikasi secara efektif dan bernegosiasi dengan baik sangat penting dalam mengatasi konflik. Kombinasi antara pengetahuan hukum, keterampilan komunikasi, dan kebijaksanaan dalam negosiasi adalah landasan utama bagi kepala desa untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan merangkul seluruh masyarakat(Sukri, 2023a).

“Saya ingin menekankan bahwa kepemimpinan yang efektif tidak hanya bergantung pada pengetahuan teknis atau hukum semata. Keterampilan dalam berkomunikasi dengan baik dan mampu meredakan ketegangan melalui negosiasi adalah modal yang tak ternilai. Dengan memahami perbedaan dan bekerja untuk

mencari solusi bersama, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih damai dan harmonis bagi masyarakat kita."

Konflik di Dusun Cangaan muncul antara masyarakat lokal dengan jamaah salafi wahabi dikarenakan terdapat peraturan desa yang menyatakan bahwa masyarakat yang ajaran Islamnya tidak sama dengan ajaran leluhur dilarang untuk berkembang di Dusun Cangaan. Peraturan ini menciptakan ketegangan dan perbedaan pandangan dalam masyarakat, karena jamaah salafi wahabi merasa bahwa hak mereka untuk mempraktikkan keyakinan mereka dibatasi oleh peraturan tersebut. Masyarakat lokal, di sisi lain, berpendapat bahwa peraturan tersebut adalah upaya untuk menjaga kesinambungan tradisi dan ajaran agama yang telah lama dianut oleh masyarakat setempat.

Ketidaksepakatan mengenai interpretasi peraturan ini semakin memperkeruh suasana, dengan masyarakat lokal merasa khawatir bahwa ajaran baru tersebut dapat mengganggu keseimbangan sosial dan keharmonian yang sudah ada di desa. Di lain pihak, jamaah salafi wahabi merasa bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk beribadah sesuai keyakinan mereka dan merasa diberikan perlakuan yang tidak adil. Kepala desa, menyadari eskalasi konflik yang dapat terjadi, berinisiatif untuk memulai komunikasi dengan jamaah salafi wahabi sebagai langkah awal dalam menyelesaikan masalah ini. Dalam dialog tersebut, dia berusaha untuk menjelaskan alasan di balik peraturan desa tersebut, serta memahami kekhawatiran dan pandangan jamaah salafi wahabi. Dia menjelaskan bahwa tujuan peraturan ini adalah untuk menjaga harmoni dan keseimbangan dalam masyarakat.

Kepala desa juga mengusulkan agar jamaah salafi wahabi dan masyarakat lokal bersama-sama mencari solusi yang dapat menghormati perbedaan pandangan, sambil tetap menjaga keharmonian di desa. Dia mendorong pembentukan kelompok diskusi atau forum dialog yang melibatkan tokoh agama dan masyarakat untuk mencari titik tengah yang dapat diterima oleh semua pihak. Dalam upayanya untuk meredakan ketegangan, kepala desa menekankan pentingnya memahami konteks budaya dan tradisi setempat, serta meresponsnya dengan sikap saling menghormati. Dia ingin memastikan bahwa hak semua warga untuk menjalankan keyakinan agama mereka tetap diakui, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai kebersamaan dan kerukunan yang telah lama menjadi ciri desa tersebut.

Dengan mengambil langkah-langkah tersebut, kepala desa berharap dapat menciptakan ruang untuk dialog yang produktif dan mengurangi konflik yang dapat merugikan kedua belah pihak. Dia ingin memastikan bahwa solusi yang ditemukan akan memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh masyarakat Dusun Cangaan,

dengan menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan keharmonian sosial. Berdasarkan keterangan kepala desa menyatakan bahwa(Sukri, 2023a):

“Ada beberapa orang yang berasal dari jamaah salafi wahabi mencoba untuk mendirikan mushola di Dusun Cangaan. Hal ini jelas bertentangan dengan wasiat leluhur yang menyatakan bahwa Dusun Cangaan merupakan masyarakat islam yang beraliran Ahlussunah Wal Jamaah sesuai ajaran NU. Perbedaan aliran ini yang menyebabkan terjadinya penolakan jamaah sehingga sampai terjadi penutupan mushola sebagai tempat jamaah salafi wahabi.”

Kepala desa juga melakukan komunikasi yang efektif kepada jamaah salafi untuk meredam konflik agar tidak menjadi konflik kekerasan antar masyarakat. Dia menyadari bahwa pentingnya mendekati mereka secara bijaksana dan terbuka untuk membahas perbedaan pandangan. Komunikasi yang dilakukan yaitu dengan menggunakan komunikasi primer, seperti pertemuan langsung dengan perwakilan jamaah salafi. Dalam hal ini, kepala desa berusaha memahami perspektif dan kekhawatiran mereka serta berbagi pandangan masyarakat sekitar. Selain itu, dia menggunakan simbol-simbol budaya dan agama yang dihormati oleh semua pihak untuk mengurangi ketegangan.

Kepala desa berusaha menjelaskan dengan tenang bahwa tujuan dari usaha komunikasi ini adalah mencapai pemahaman bersama dan menghindari tindakan konflik yang merugikan semua pihak. Dia menunjukkan penghargaan atas kebebasan berkeyakinan, sambil menekankan pentingnya menjaga kerukunan dalam kehidupan bersama. Dalam dialog tersebut, kepala desa memberikan contoh-contoh nyata tentang bagaimana perbedaan pandangan dapat disikapi dengan dewasa, tanpa harus mengorbankan hubungan sosial yang telah lama terjalin.

Kepala desa menggunakan pendekatan persuasif, mengajak jamaah salafi untuk berpikir tentang dampak jangka panjang dari konflik yang mungkin timbul. Dia berbicara mengenai pentingnya membangun lingkungan yang aman dan harmonis bagi anak-anak serta generasi mendatang. Dengan sikap terbuka, dia mengundang jamaah salafi untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan bersama masyarakat yang dapat memperkuat persatuan.

Selain itu, kepala desa berusaha menciptakan ruang untuk dialog terus-menerus, sehingga masalah yang muncul bisa segera diatasi tanpa perlu meningkat menjadi konflik yang lebih besar. Dia mengingatkan bahwa pembicaraan yang terus-menerus akan membantu menjaga saluran komunikasi terbuka dan mengurangi kesalahpahaman. Kepala desa juga menyoroti nilai-nilai persaudaraan dan gotong royong yang telah menjadi identitas desa, dan bagaimana hal ini dapat menjadi pondasi bagi penyelesaian konflik.

Dalam usahanya, kepala desa juga melibatkan tokoh-tokoh agama atau masyarakat yang dihormati oleh jamaah salafi. Mereka diajak untuk membantu menyampaikan pesan-pesan penting tentang pentingnya kerukunan dan pemahaman bersama. Melalui pendekatan yang penuh kebijaksanaan, kepala desa berharap agar jamaah salafi dapat merasakan bahwa mereka adalah bagian integral dari masyarakat yang lebih luas.

Secara keseluruhan, kepala desa berupaya untuk mencegah eskalasi konflik dengan menjalankan komunikasi efektif dan berbasis kearifan lokal. Dia ingin memastikan bahwa perbedaan pandangan tidak mengganggu harmoni desa, dan dia percaya bahwa dengan upaya yang berkelanjutan, konflik dapat diatasi tanpa harus terjadi kekerasan (Sukri, 2023b).

“Saya selaku kepala desa berkomunikasi dengan pemimpin jamaah salafi wahabi yang berada di Dusun Cangaan sebagai bagian dari strategi komunikasi primer agar tidak terjadi kekerasan antara jamaah dengan masyarakat. Dalam komunikasi ini, saya berusaha menjelaskan dengan tenang dan rasional bahwa perbedaan pandangan dapat diselesaikan melalui dialog yang terbuka dan saling menghormati. Saya mengungkapkan bahwa tujuan utama kami adalah menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis bagi seluruh warga desa, tanpa merugikan kedua belah pihak. Saya mengundang mereka untuk berpartisipasi dalam dialog bersama dan merespons keprihatinan serta pandangan masyarakat sekitar dengan sikap terbuka. Dengan berkomunikasi secara efektif, saya berharap dapat meredam potensi konflik dan mencapai pemahaman yang lebih baik di antara semua pihak yang terlibat..”

b. Pemberdayaan Terhadap Jamaah Salafi Agar Konflik Tidak Terjadi Dengan Masyarakat Di Desa Genteng Wetan

Kepala Desa Genteng Wetan memiliki peran sentral dalam menjaga harmoni dan kedamaian di desa. Salah satu pendekatan yang diambil oleh kepala desa adalah melalui pemberdayaan baik sosial maupun ekonomi kepada jamaah salafi, dengan tujuan mencegah terjadinya konflik dengan masyarakat sekitar. Pendekatan ini mencerminkan usaha nyata untuk membangun lingkungan yang inklusif dan mengedepankan kerukunan antarumat beragama.

Dalam upaya pemberdayaan sosial, kepala desa bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk tokoh agama, komunitas lokal, dan lembaga sosial. Program-program pelatihan tentang nilai-nilai toleransi, kerja sama, dan penghargaan terhadap perbedaan agama dijalankan sebagai langkah awal. Dengan demikian, jamaah salafi dipersiapkan untuk menjadi anggota masyarakat yang berkontribusi positif dan memahami pentingnya hidup berdampingan dengan harmonis (Sukri, 2023a).

“Kami sebagai pemerintah desa memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada jamaah salafi untuk mengembangkan potensi ekonomi dan sosial di Dusun Resomulyo, bukan di Dusun Cangaan. Tawaran ini mencerminkan tekad kami untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung pertumbuhan positif bagi semua warga desa. Dengan memilih Dusun Resomulyo sebagai alternatif lokasi, kami ingin menunjukkan komitmen kami dalam mencegah terjadinya konflik dan membangun kerjasama yang saling menguntungkan. Melalui langkah ini, kami berharap jamaah salafi dapat merasa dihargai dan terlibat dalam pembangunan desa tanpa mengorbankan hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar. Kami meyakini bahwa pemberdayaan ekonomi dan sosial di lingkungan baru akan membawa manfaat positif bagi jamaah salafi dan keseluruhan desa, serta membuka peluang kerjasama yang lebih luas di masa depan. Dengan memberikan kesempatan ini, kami berupaya untuk menciptakan harmoni dan kedamaian yang berkelanjutan dalam desa kami.”

Melalui berbagai upaya pemberdayaan ini, kepala desa Genteng Wetan menciptakan lingkungan di mana jamaah salafi merasa terlibat secara aktif dan dihormati oleh masyarakat. Hal ini tidak hanya mencegah konflik yang dapat timbul, tetapi juga membangun pondasi yang kokoh untuk harmoni dan kedamaian dalam jangka panjang.

Kepala desa juga memberikan saran terkait pemberdayaan yang dapat dilakukan agar konflik tidak terus terjadi. Salah satu saran yang dia berikan adalah mengadakan pelatihan mengenai manajemen konflik dan keterampilan komunikasi bagi warga desa. Selain itu, dia menyarankan pendekatan pembangunan masyarakat yang melibatkan berbagai kelompok, sehingga kepentingan bersama lebih diutamakan daripada perbedaan. Kepala desa juga menekankan pentingnya mendukung kegiatan budaya dan seni yang dapat mengikat hubungan sosial antarwarga. Selain itu, dia mengajak warga untuk lebih aktif dalam menjaga toleransi dan menghargai perbedaan, sebagai langkah konkret dalam mencegah konflik (Sukri, 2023a)..

“Saya telah mengajukan tawaran untuk memindahkan jamaah salafi wahabi ke Dusun Resomulyo sebagai alternatif lokasi dari Dusun Cangaan. Pertimbangan saya adalah bahwa Dusun Resomulyo memiliki keragaman masyarakat yang lebih luas. Saya yakin bahwa dengan mengambil langkah ini, peluang terjadinya konflik antara jamaah dan masyarakat sekitar dapat diminimalkan. Dengan adanya keragaman masyarakat yang lebih besar, potensi untuk membangun pemahaman bersama dan menghormati perbedaan menjadi lebih besar pula.”

Berdasarkan pemberdayaan jamaah salafi tersebut, diharapkan kondisi desa Genteng Wetan akan selalu damai tanpa ada konflik agama di dalamnya.

Pemberdayaan ini tidak hanya merupakan solusi jangka pendek, tetapi juga investasi jangka panjang dalam keharmonisan masyarakat. Dengan memberikan jamaah salafi kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi dan sosial, kami berharap akan tercipta iklim yang inklusif dan saling menghormati di seluruh desa.

Pemberdayaan jamaah salafi tidak hanya mengurangi risiko konflik agama, tetapi juga dapat meningkatkan integrasi sosial. Melalui pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha, jamaah salafi dapat menjadi bagian yang produktif dalam perekonomian desa. Dengan berkontribusi dalam kegiatan bersama, mereka dapat membangun koneksi positif dengan masyarakat sekitar dan membantu memperkuat ikatan sosial. Dalam konteks ini, pemerintah desa Genteng Wetan berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi kerjasama dan membangun jembatan antara jamaah salafi dan warga desa lainnya. Dengan menciptakan peluang-peluang untuk berinteraksi dan berkolaborasi, kami menciptakan platform yang mempromosikan pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan keyakinan. Dengan demikian, pemberdayaan ini juga mendorong tumbuhnya rasa solidaritas dan persatuan di tengah-tengah keberagaman.

Namun, pemberdayaan ini bukanlah proses yang instan, melainkan perjalanan yang memerlukan komitmen dan kerja keras dari semua pihak terlibat. Pemerintah desa, tokoh agama, jamaah salafi, dan masyarakat lainnya harus bersama-sama mewujudkan visi damai dan harmoni ini. Dengan melibatkan seluruh komunitas, kami optimis bahwa pemberdayaan ini akan menjadi langkah positif dalam menjaga ketentraman desa Genteng Wetan dalam jangka panjang.

2. Pembahasan

a. Strategi Komunikasi Kepala Desa Dalam Penyelesaian Konflik Dengan Jamaah Salafi Di Desa Genteng Wetan

1) Pola Komunikasi Primer

Pola komunikasi primer yang dilakukan oleh kepala desa Genteng Wetan dalam penyelesaian konflik antara jamaah salafi dengan masyarakat adalah strategi yang memiliki implikasi yang dalam dan penting bagi terciptanya harmoni serta kerukunan di desa. Pola komunikasi ini merupakan upaya untuk menghindari konflik kekerasan dan membangun pemahaman bersama melalui interaksi langsung dan dialog terbuka antara pihak-pihak yang terlibat (Handayani, 2023).

Pola komunikasi primer adalah pendekatan yang memfokuskan pada interaksi langsung antara kepala desa dengan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Dalam hal ini, kepala desa berperan sebagai mediator yang membuka saluran komunikasi untuk mendengarkan permasalahan dan keprihatinan dari

masing-masing pihak (Oktavianti & Setiawati, 2021). Melalui dialog yang terbuka, pihak-pihak yang bersengketa memiliki kesempatan untuk saling mendengarkan dan mengungkapkan pandangan serta kepentingan masing-masing.

Kepala desa sebagai tokoh sentral dalam pemerintahan desa memiliki peran yang krusial dalam membangun kerangka komunikasi yang efektif. Ia menghadirkan dirinya sebagai pihak yang netral dan adil, sehingga semua pihak merasa nyaman untuk berbicara. Dalam dialog ini, kepala desa menciptakan atmosfer yang mengedepankan penghormatan dan saling menghargai, serta mendorong pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari solusi yang baik bagi semua (Gori & Simamora, 2020). Pola komunikasi primer ini memungkinkan kepala desa untuk mendalami akar permasalahan yang mendasari konflik. Dengan mendengarkan secara mendalam, ia dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang memicu konflik dan mencari titik temu yang bisa diterima oleh semua pihak. Dengan pendekatan ini, kepala desa memahami bahwa penyelesaian konflik bukanlah menghapus perbedaan, tetapi mencari jalan untuk hidup berdampingan dengan harmonis.

Dalam melaksanakan pola komunikasi primer, kepala desa membuka pintu untuk dialog terus-menerus. Pertemuan dan diskusi reguler diadakan untuk memastikan bahwa proses komunikasi berjalan secara berkelanjutan. Ini juga membantu mencegah terjadinya penumpukan masalah dan ketegangan yang dapat memicu konflik lebih lanjut.

Melalui komunikasi primer, kepala desa berupaya untuk menghindari eskalasi konflik dan mendorong pihak-pihak yang terlibat untuk memahami perspektif yang lebih luas. Dengan membuka peluang untuk saling bertukar pandangan, pihak-pihak yang awalnya saling berseberangan dapat melihat permasalahan dari sudut pandang yang berbeda dan mengembangkan empati terhadap satu sama lain. Pola komunikasi primer ini juga mencakup penggunaan simbol-simbol dan metafora yang dapat meredam ketegangan. Kepala desa dapat menggunakan bahasa yang mengandung makna mendalam dan dapat diterima oleh semua pihak. Dalam banyak kasus, simbol-simbol ini dapat menjadi jembatan yang menghubungkan pemahaman di antara pihak-pihak yang berkonflik (Oktavianti & Setiawati, 2021).

Dalam proses komunikasi ini, kepala desa juga berperan sebagai penengah yang membantu meredakan emosi yang mungkin timbul. Ia mendorong pihak-pihak yang terlibat untuk berbicara dengan tenang dan rasional, serta menghindari retorika yang dapat memicu pertikaian lebih lanjut (Praptama & Fatikh, 2022). Penting untuk dicatat bahwa pola komunikasi primer ini bukanlah solusi instan, tetapi langkah awal menuju pemahaman dan rekonsiliasi yang lebih mendalam.

Dalam beberapa kasus, mungkin dibutuhkan waktu untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak. Namun, melalui kesabaran dan ketekunan, kepala desa dapat membantu membina hubungan yang lebih baik di antara pihak-pihak yang berkonflik (Budhirianto, 2015).

Selain itu, pola komunikasi primer ini dapat memfasilitasi pembentukan kelompok diskusi atau forum dialog yang melibatkan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga desa. Dalam kerangka ini, kepala desa menjembatani berbagai pandangan dan menciptakan ruang yang aman untuk berbagi ide dan solusi. Selama proses komunikasi primer, kepala desa juga memfasilitasi penyampaian informasi yang akurat dan transparan. Hal ini membantu mencegah munculnya kesalahpahaman dan spekulasi yang dapat memperburuk situasi. Informasi yang jujur dan terbuka juga memberikan dasar yang kuat bagi pembuatan keputusan yang bijaksana.

Pola komunikasi primer juga melibatkan pemberian kesempatan bagi semua pihak untuk merasa didengar dan dihargai. Kepala desa tidak hanya fokus pada permasalahan praktis, tetapi juga mengakui aspek emosional yang terlibat dalam konflik. Dengan mendengarkan perasaan dan aspirasi dari masing-masing pihak, kepala desa dapat merangkul kedekatan emosional dan menciptakan koneksi yang lebih mendalam. Dalam beberapa kasus, pola komunikasi primer ini juga melibatkan perumusan kesepakatan tertulis yang mengikat. Kepala desa memastikan bahwa solusi yang disepakati tertulis dengan jelas, termasuk langkah-langkah tindak lanjut yang harus diambil oleh semua pihak. Dokumen ini dapat menjadi pedoman yang membantu mencegah terjadinya konflik serupa di masa depan.

Selain mengedepankan dialog dan komunikasi langsung, kepala desa juga memanfaatkan teknologi komunikasi modern untuk memfasilitasi interaksi. Penggunaan media sosial, grup pesan, atau platform online dapat membantu memperluas cakupan komunikasi dan memberikan akses yang lebih mudah bagi pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, penting bagi kepala desa untuk memastikan bahwa semua upaya komunikasi yang dilakukan menghormati prinsip-prinsip keamanan, kerahasiaan, dan privasi. Penggunaan informasi dan data yang sensitif harus dikelola dengan bijaksana demi menjaga hubungan yang saling menguntungkan.

Dalam kesimpulannya, pola komunikasi primer yang diterapkan oleh kepala desa Genteng Wetan merupakan strategi yang integral dalam mengatasi konflik antara jamaah salafi dan masyarakat. Melalui interaksi langsung, pendekatan adil, penggunaan simbol-simbol, dan pembentukan forum dialog, kepala desa menciptakan ruang yang aman dan inklusif bagi pihak-pihak yang berkonflik untuk

berbicara dan mencari solusi bersama. Pola komunikasi ini memperkuat kerukunan dan membangun fondasi yang kuat bagi kedamaian di desa Genteng Wetan.

2) Pola Komunikasi Sekunder

Pola komunikasi sekunder yang dilakukan oleh kepala desa Genteng Wetan dalam penyelesaian konflik antara jamaah salafi dengan masyarakat adalah pendekatan yang melibatkan pihak-pihak lain sebagai perantara atau mediator dalam upaya meredam ketegangan dan membangun pemahaman bersama. Pola komunikasi ini membuka jalan bagi partisipasi luas dari berbagai unsur masyarakat, memperluas cakupan solusi yang mungkin, dan mendorong penciptaan lingkungan yang inklusif serta harmonis.

Dalam pola komunikasi sekunder, kepala desa berperan sebagai penghubung antara pihak-pihak yang berkonflik dengan pihak ketiga yang netral. Pihak ketiga ini bisa berupa tokoh agama, tokoh masyarakat, atau lembaga tertentu yang dihormati oleh semua pihak. Melalui interaksi dengan pihak ketiga ini, kepala desa menciptakan jalur komunikasi yang lebih terstruktur dan terarah (Littlejohn & Foss, 2009). Pola komunikasi sekunder seringkali melibatkan pertemuan formal atau mediasi yang dihadiri oleh kepala desa, pihak ketiga, dan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Mediator berperan dalam memfasilitasi dialog, memastikan bahwa komunikasi berjalan dengan baik, dan membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk mencari titik temu yang dapat diterima oleh semua.

Dalam pola komunikasi ini, mediator biasanya memulai dengan menyediakan ruang bagi masing-masing pihak untuk menyampaikan pandangan dan perasaan mereka terkait konflik. Setiap pihak diberi kesempatan untuk mendengarkan dan memberikan tanggapan terhadap argumen dan pernyataan dari pihak lain. Kepala desa sebagai mediator berperan dalam memastikan bahwa semua pihak merasa didengar dan dihargai. Pola komunikasi sekunder ini juga dapat memanfaatkan keahlian dan pengetahuan pihak ketiga untuk membantu merumuskan solusi yang adil dan berkelanjutan. Mediator dapat memberikan saran-saran berdasarkan pengalaman dan wawasan mereka, serta mengedepankan pendekatan yang mengutamakan kepentingan bersama. Dalam hal ini, peran pihak ketiga sangat penting dalam memfasilitasi tercapainya kesepakatan yang saling menguntungkan.

Selain itu, pola komunikasi sekunder dapat memanfaatkan prinsip dialog melalui pertemuan berkelompok yang lebih besar. Forum diskusi yang melibatkan berbagai pihak yang relevan, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga desa, dapat menjadi sarana untuk berbagi sudut pandang, mengeksplorasi solusi alternatif, dan mencari titik kesepakatan. Kepala desa berperan dalam memimpin forum ini dan memastikan bahwa dialog berjalan dengan baik.

Dalam pola komunikasi sekunder, mediator juga berusaha untuk mengatasi perbedaan persepsi dan pemahaman antara pihak-pihak yang terlibat. Penjelasan yang jelas dan persuasif dapat membantu mengurai simpul permasalahan yang rumit. Melalui pendekatan ini, kepala desa sebagai mediator berupaya untuk membangun pemahaman bersama yang lebih mendalam. Pola komunikasi ini juga dapat memfasilitasi penyusunan perjanjian tertulis atau kesepakatan resmi yang mengikat semua pihak yang terlibat. Dokumen ini memuat rincian solusi yang disepakati, langkah-langkah tindak lanjut yang harus diambil, dan mekanisme pemantauan dan evaluasi. Dengan adanya kesepakatan tertulis, semua pihak memiliki pegangan yang kuat untuk memastikan ketaatan terhadap solusi yang telah disepakati.

Dalam beberapa kasus, pola komunikasi sekunder juga melibatkan ahli atau pakar yang memiliki pengetahuan khusus dalam mengatasi konflik. Kepala desa dapat mengundang ahli dari luar untuk memberikan pandangan objektif dan solusi yang berbasis pada pengetahuan yang mendalam (Illah & Hermawan, 2022). Dalam pola komunikasi sekunder, kepala desa juga mengambil peran sebagai fasilitator yang mendukung kelancaran proses dialog. Ia memastikan bahwa semua pihak memiliki kesempatan yang adil untuk berbicara, bahwa argumen disampaikan dengan baik, dan bahwa komunikasi berlangsung dalam suasana yang terbuka dan menghormati.

Pola komunikasi sekunder ini tidak hanya mengejar penyelesaian konflik secara langsung, tetapi juga mengedepankan upaya penguatan hubungan di antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan membuka jalur komunikasi yang lebih struktur, kepala desa menciptakan peluang bagi pemahaman yang lebih mendalam dan toleransi yang lebih luas. Pola komunikasi sekunder juga mencakup memanfaatkan jaringan dan hubungan yang ada untuk mencari dukungan dari pihak-pihak luar yang dapat mempengaruhi penyelesaian konflik. Kepala desa dapat berkomunikasi dengan lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga internasional yang memiliki pengalaman dalam mengatasi konflik agama.

Penting untuk mencatat bahwa pola komunikasi sekunder ini mungkin memerlukan waktu yang lebih lama dan lebih kompleks daripada pola komunikasi primer. Namun, melalui upaya yang berkelanjutan, kepala desa sebagai mediator dapat membawa pihak-pihak yang berkonflik menuju titik kesepakatan yang menghormati kepentingan semua pihak. Dalam kesimpulannya, pola komunikasi sekunder yang diterapkan oleh kepala desa Genteng Wetan merupakan upaya yang matang dan sistematis dalam mengatasi konflik antara jamaah salafi dan masyarakat. Melalui peran mediator, pemberian ruang untuk partisipasi luas, serta pemanfaatan saran dari pihak ketiga yang netral, kepala desa menciptakan

lingkungan yang mendukung proses rekonsiliasi dan membuka jalan bagi terciptanya kedamaian yang berkelanjutan.

3) Pola Komunikasi Linier

Pola komunikasi linier yang dilakukan oleh kepala desa Genteng Wetan dalam penyelesaian konflik antara jamaah salafi dengan masyarakat merupakan pendekatan yang terarah dan terstruktur dalam mentransmisikan informasi serta memastikan pemahaman yang konsisten di antara semua pihak yang terlibat. Pola komunikasi ini mengedepankan aliran komunikasi yang sejajar dan bertahap, sehingga semua pihak memiliki informasi yang sama dan pemahaman yang jelas mengenai permasalahan dan solusi yang diusulkan.

Dalam pola komunikasi linier, kepala desa sebagai pemimpin berperan sebagai sumber utama informasi. Ia memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan data dan fakta terkait konflik, merumuskan pesan yang jelas dan objektif, serta menyampaikannya kepada semua pihak yang terlibat. Dalam hal ini, penting bagi kepala desa untuk berkomunikasi dengan akurat dan obyektif, menghindari bias atau penekanan yang dapat memicu lebih banyak konflik. Pola komunikasi linier ini sering dimulai dengan menyampaikan fakta-fakta yang berkaitan dengan konflik kepada semua pihak yang terlibat. Kepala desa menjelaskan secara terinci mengenai asal usul konflik, perbedaan pandangan, dan permasalahan yang muncul. Dengan memberikan informasi yang komprehensif, kepala desa berupaya untuk mencegah munculnya kesalahpahaman atau interpretasi yang salah dari pihak-pihak yang terlibat.

Setelah memberikan paparan mengenai fakta-fakta, kepala desa melanjutkan dengan menjelaskan dampak dan implikasi dari konflik yang terjadi. Ia mengkomunikasikan dengan jelas bagaimana konflik tersebut dapat mempengaruhi hubungan antara jamaah salafi dan masyarakat, stabilitas desa, serta potensi kerugian bagi semua pihak. Dalam hal ini, kepala desa mengedepankan transparansi dan kejujuran dalam penyampaian informasi.

Dalam pola komunikasi linier ini, kepala desa juga menyampaikan visi dan tujuan yang diinginkan dalam penyelesaian konflik. Ia menjelaskan bagaimana kedamaian, harmoni, dan kerukunan merupakan tujuan bersama yang harus dicapai oleh semua pihak. Dengan merinci manfaat yang mungkin diperoleh dari penyelesaian konflik, kepala desa mendorong pihak-pihak yang terlibat untuk melihat gambaran yang lebih luas.

Selain itu, kepala desa dalam pola komunikasi linier ini juga berperan sebagai pendukung dan fasilitator dalam proses rekonsiliasi. Ia menjelaskan langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mencapai penyelesaian, termasuk peran masing-masing pihak dalam mengimplementasikan solusi yang telah disepakati.

Kepala desa mengarahkan semua pihak menuju arah yang sama, sehingga upaya penyelesaian dapat dilakukan secara terstruktur.

Pola komunikasi linier juga melibatkan pertemuan-pertemuan atau forum-forum yang melibatkan semua pihak yang terlibat dalam konflik. Dalam forum ini, kepala desa menyampaikan informasi, mendengarkan tanggapan, dan mengedepankan dialog terbuka. Forum-forum ini menjadi wadah bagi semua pihak untuk bertukar pandangan, bertanya, serta mencari klarifikasi mengenai isu-isu yang muncul (Safitri, 2020).

Dalam upaya komunikasi linier, kepala desa juga dapat menggunakan media komunikasi tertulis atau visual untuk menyampaikan pesan dengan lebih jelas dan terstruktur. Surat, brosur, atau presentasi dapat digunakan untuk merinci informasi, solusi yang diusulkan, serta dampak dari penyelesaian konflik. Melalui media ini, kepala desa memastikan bahwa pesan disampaikan secara konsisten dan dapat diakses oleh semua pihak. Selain itu, kepala desa dalam pola komunikasi linier dapat memanfaatkan teknologi komunikasi modern seperti email, grup pesan, atau platform online untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki akses kepada informasi terbaru dan pengumuman penting. Ini membantu menjaga saluran komunikasi yang terbuka dan transparan.

Dalam kesimpulannya, pola komunikasi linier yang dijalankan oleh kepala desa Genteng Wetan merupakan upaya sistematis dalam memastikan informasi yang akurat, pemahaman yang jelas, serta arah yang terarah bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik. Melalui pendekatan yang terstruktur ini, kepala desa menciptakan landasan yang kuat untuk mencapai solusi yang dapat diterima oleh semua dan membangun pemahaman yang lebih mendalam mengenai situasi yang ada.

b. Pemberdayaan Terhadap Jamaah Salafi Agar Konflik Tidak Terjadi Dengan Masyarakat Di Desa Genteng Wetan

Konflik agama yang terjadi antara jamaah salafi dengan masyarakat di Desa Genteng Wetan merupakan tantangan serius yang membutuhkan solusi berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang diambil dalam penyelesaian konflik ini adalah melalui pemberdayaan terhadap jamaah salafi. Hal akan mengkaji dan menganalisis berbagai upaya yang dilakukan oleh kepala desa Genteng Wetan dalam membangun pemberdayaan terhadap jamaah salafi agar konflik tidak terjadi dengan masyarakat. Pemberdayaan merupakan pendekatan yang berfokus pada peningkatan kapasitas dan keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam pembangunan dan pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Dalam konteks penyelesaian konflik agama, pemberdayaan jamaah salafi

menjadi solusi yang menguntungkan, karena dapat mengubah dinamika konflik menjadi peluang untuk pertumbuhan bersama dan rekonsiliasi.

Pemberdayaan jamaah salafi dapat diartikan sebagai memberikan kesempatan kepada mereka untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa, ekonomi lokal, dan kegiatan sosial. Dengan merasa diakui dan memiliki peran yang positif dalam masyarakat, jamaah salafi lebih cenderung untuk meredam sikap radikal dan mengurangi konflik dengan masyarakat. Dalam upaya menghindari terjadinya konflik agama yang lebih luas, kepala desa Genteng Wetan mengambil beberapa langkah strategis dalam membangun pemberdayaan terhadap jamaah salafi. Langkah pertama adalah memberikan akses yang lebih luas kepada jamaah salafi dalam kegiatan masyarakat, seperti pertemuan warga, diskusi, dan kegiatan keagamaan bersama.

Dalam upaya mencegah eskalasi konflik agama yang dapat mengganggu stabilitas desa, kepala desa Genteng Wetan telah mengambil serangkaian langkah strategis untuk membangun pemberdayaan jamaah salafi. Salah satu langkah pertama yang diambil adalah memberikan akses yang lebih inklusif kepada jamaah salafi dalam berbagai kegiatan masyarakat. Ini dilakukan dengan tujuan untuk melibatkan mereka dalam kehidupan sosial desa, sekaligus membuka peluang untuk pertukaran pandangan dan pengalaman. Dalam upaya tersebut, kepala desa berusaha untuk menciptakan ruang bagi jamaah salafi dalam pertemuan-pertemuan warga, diskusi publik, dan kegiatan keagamaan yang dihadiri oleh masyarakat desa secara luas. Hal ini memberikan kesempatan bagi jamaah salafi untuk berinteraksi dengan warga lainnya, saling mengenal, dan membangun ikatan sosial yang lebih kuat. Keikutsertaan mereka dalam kegiatan-kegiatan ini juga membantu mengubah persepsi masyarakat terhadap jamaah salafi (Sukri, 2023b).

Selain memberikan akses kepada berbagai kegiatan masyarakat, kepala desa juga mendorong adanya diskusi dan kegiatan keagamaan bersama. Jamaah salafi diundang untuk berpartisipasi dalam dialog lintas agama atau forum-forum diskusi yang mengakomodasi berbagai pandangan keagamaan. Dengan berdialog, jamaah salafi dan masyarakat dapat saling memahami dan menghormati perbedaan pandangan. Langkah ini sejalan dengan upaya kepala desa untuk memastikan bahwa jamaah salafi tidak hanya dikenal sebagai kelompok yang eksklusif, tetapi juga sebagai bagian yang aktif dalam membangun harmoni sosial. Dengan memberikan akses dan melibatkan mereka dalam kegiatan bersama, kepala desa berharap bahwa jamaah salafi dapat merasa memiliki tanggung jawab dalam menjaga perdamaian dan keberagaman di desa.

Lebih jauh lagi, langkah-langkah tersebut juga mencerminkan komitmen kepala desa dalam menjunjung tinggi prinsip inklusivitas dan partisipasi aktif dalam

pengambilan keputusan. Kepala desa memahami bahwa mengabaikan kelompok tertentu dalam kegiatan masyarakat dapat mengisolasi mereka dan memperburuk ketidakpahaman. Oleh karena itu, langkah-langkah yang diambil bertujuan untuk menciptakan ruang yang adil dan terbuka bagi semua pihak, tanpa memandang perbedaan agama.

Dalam upaya memberikan akses yang lebih luas kepada jamaah salafi, kepala desa juga memperluas kesempatan bagi mereka untuk berbagi pandangan dan aspirasi. Pertemuan-pertemuan warga atau forum diskusi diarahkan untuk menjadi ajang di mana jamaah salafi dapat menyampaikan pendapat mereka tentang berbagai isu yang berkaitan dengan masyarakat desa. Dengan demikian, kepala desa ingin memastikan bahwa suara mereka didengar dan dihargai dalam proses pengambilan keputusan.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh kepala desa ini juga merupakan bentuk pemberdayaan melalui peningkatan keterlibatan sosial. Dengan memberikan peluang kepada jamaah salafi untuk hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat secara luas, kepala desa berusaha untuk mengurangi isolasi dan ketidakpastian yang mungkin dirasakan oleh jamaah salafi. Ini juga menjadi langkah awal dalam membangun kerjasama dan kerukunan di antara berbagai kelompok agama.

Dalam esensi, langkah pertama ini adalah langkah yang proaktif dalam mencegah munculnya konflik dengan membuka pintu komunikasi dan interaksi yang lebih intens antara jamaah salafi dan masyarakat. Melalui partisipasi dalam kegiatan bersama, jamaah salafi dapat lebih memahami nilai-nilai dan tradisi lokal, sementara masyarakat dapat melihat jamaah salafi sebagai bagian yang terlibat secara positif dalam kehidupan desa. Selanjutnya, langkah-langkah strategis ini menjadi dasar penting dalam membangun pemahaman bersama dan mendorong dialog antara jamaah salafi dan masyarakat secara lebih luas. Dengan langkah pertama ini, kepala desa Genteng Wetan telah memberikan pijakan yang kuat untuk membangun pemberdayaan yang lebih komprehensif, serta menghindari potensi terjadinya konflik agama yang lebih besar di masa mendatang.

Pemberdayaan jamaah salafi juga melibatkan penguatan peran sosial mereka dalam masyarakat. Kepala desa berupaya untuk mengakomodasi partisipasi jamaah salafi dalam kegiatan sosial seperti program keagamaan, gotong royong, dan kegiatan amal. Dengan berkontribusi pada kesejahteraan sosial masyarakat, jamaah salafi dapat membangun hubungan yang lebih harmonis dengan masyarakat. Melalui pemberdayaan, kepala desa Genteng Wetan juga mengenalkan model peran positif bagi jamaah salafi. Mereka diarahkan untuk menjadi panutan dalam hal

keagamaan, kedisiplinan, dan partisipasi aktif dalam masyarakat. Dengan menjadi teladan yang baik, jamaah salafi dapat membangun citra positif di mata masyarakat.

D. Simpulan

Kepala Desa Genteng Wetan telah mempraktikkan tiga pola komunikasi yang strategis dalam menyelesaikan konflik dengan jamaah Salafi Wahabi. Pola komunikasi primer menjadi fondasi utama dalam mengatasi perbedaan pandangan dan membangun hubungan yang lebih harmonis antara kedua pihak. Dalam hal ini, kepala desa mendasarkan dialognya pada aspek-aspek kesamaan dan nilai bersama yang dimiliki oleh desa dan jamaah Salafi Wahabi. Melalui pendekatan ini, ia berupaya meminimalkan ketegangan dan mengidentifikasi kesamaan visi dan misi yang dapat menjadi dasar kerja sama di masa depan.

Pola komunikasi sekunder merupakan tahap berikutnya dalam strategi kepala desa. Pada tingkat ini, ia mencoba menjalin kontak lebih pribadi dengan anggota jamaah Salafi Wahabi, berfokus pada pendekatan empati dan pemahaman yang lebih dalam terhadap kebutuhan serta harapan mereka. Kepala desa mungkin mengadakan pertemuan-pertemuan informal dan berusaha membangun kepercayaan melalui dialog terbuka dan berkelanjutan. Dengan demikian, ia menciptakan ruang yang lebih kondusif untuk mencari solusi bersama.

Pola komunikasi tersier mengacu pada langkah konkret yang diambil oleh kepala desa untuk mengatasi konflik. Dalam hal ini, ia telah memberdayakan jamaah Salafi Wahabi dengan menawarkan saran yang dapat mengurangi potensi konflik. Salah satu tindakan nyata yang diambil adalah dengan menyarankan agar mushola tempat ibadah mereka yang berada di dusun Cangaan dipindahkan ke dusun Resomulyo. Tindakan ini mencerminkan kepedulian kepala desa terhadap kepentingan dan keamanan masyarakat secara keseluruhan, menciptakan solusi yang memungkinkan semua pihak untuk tetap menjalankan keyakinan mereka tanpa konflik yang tidak perlu. Dengan demikian, kepala desa Genteng Wetan berhasil memanfaatkan pola komunikasi primer, sekunder, dan tersier untuk mengatasi konflik dengan bijak dan damai, menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara desa dan jamaah Salafi Wahabi.

Daftar Rujukan

- Azeharie, S. (2015). Pola Komunikasi Antara Pedagang dan Pembeli di Desa Pare, Kampung Inggris Kediri. *Jurnal Komunikasi*, 7(2), 207–223.
- Budhirianto, S. (2015). Pola Komunikasi untuk Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat dalam Menyukseskan Program Swasembada Pangan. *Jurnal Pekommas*, 18(2), 127–138.

- Gori, F., & Simamora, P. R. (2020). Pola Komunikasi Organisasi Dalam Meningkatkan Kinerja Kepala Desa Marao Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan. *JURNAL SOCIAL OPINION: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 5(2), 115–122.
- Handayani, W. (2023). *POLA KOMUNIKASI KEPALA DESA SEMANGAT DALAM PADA PENGELOLAAN SAMPAH PERUMAHAN DI KABUPATEN BARITO KUALA* (PhD Thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB). Universitas Islam Kalimantan MAB. Retrieved from <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/16453/>
- Hubberman, A. M., & Miles, M. B. (1994). *Qualitative data analysis*.
- Illah, I. A., & Hermawan, H. (2022). Blue Ocean Leadership: Analisis Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Paleran. *National Multidisciplinary Sciences*, 1(1), 6–10.
- Juditha, C. (2020). Dampak Penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi Terhadap Pola Komunikasi Masyarakat Desa. *Jurnal PIKOM*, 131–144.
- Lampe, I. (2018). Pola Komunikasi Gerakan Sosial Komunitas Sekitar Tambang Migas Tiaka: Refleksi Identitas Etnik Lokal. *Jurnal Aspikom*, 3(5), 860–873.
- Lasswell, H. D. (1948). The structure and function of communication in society. *The Communication of Ideas*, 37(1), 136–139.
- Lestari, A. G. (2019). *Pola Komunikasi Kepala Desa Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (Kabupaten Simalungun)* (PhD Thesis).
- Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2009). *Encyclopedia of communication theory* (Vol. 1). Sage.
- Nurdiansyah, I. (2017). *Pola Komunikasi Kepala Desa Dalam Upaya Pembinaan Generasi Muda (Studi Di Desa Air Berudang Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan)* (PhD Thesis, UIN Ar-Raniry). UIN Ar-Raniry. Retrieved from <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/10963/>
- Oktavianti, N., & Setiawati, B. (2021). POLA KOMUNIKASI MENYELURUH KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN RAPAT DI DESA HALONG KECAMATAN HARUAI KABUPATEN TABALONG. *JAPB*, 4(2), 1007–1017.
- Praptama, R., & Fatikh, A. (2022). Pola Komunikasi Kepala Desa Petak Dalam Pengelolaan Progam Inovasi Desa Petak Menuju Pemberdayaan Masyarakat. *Syar: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 2(2), 99–110. <https://doi.org/10.54150/syar.v2i2.100>
- SAFITRI, A. A. H. (2020). *POLA KOMUNIKASI POLITIK KEPALA DESA BOJONG INDAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA*. Retrieved from https://www.academia.edu/download/63463558/ilovepdf_merged20200529-21247-fyfxxp.pdf

- Sukri. (2023a). *Wawancara dengan H. Sukri selaku Kepala Desa Genteng Wetan*.
- Sukri. (2023b, August 13). *Wawancara dengan Kepala Desa genteng Wetan*.
- Susilawati, E., & Zikri, A. E. (2022). Pola Komunikasi Kepala Desa dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur di Kantor Desa Gunung Jaya Cisaat Kabupaten Sukabumi. *Jurnalika: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(2), 83–97.
- Tahir, M. T. (2023). *Pola komunikasi kepala desa dalam sosialisasi Vaksinasi Covid-19 di Desa Badrain Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat* (PhD Thesis, UIN Mataram). UIN Mataram. Retrieved from <http://etheses.uinmataram.ac.id/id/eprint/3767>
- Utami, Y. S. (2016). POLA KOMUNIKASI ETNIS ARAB DAN ETNIS SUNDA DALAM PERKAWINAN MUT'AH DI KECAMATAN PACET KABUPATEN CIANJUR. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 4(1), 75–84. <https://doi.org/10.24198/jkk.v4i1.7841>
- Warsah, I., Avisa, A., & Anrial, A. (2020). Pola Komunikasi Antar Umat Beragama Masyarakat Desa Sindang Jaya, Rejang Lebong, Bengkulu. *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan Dan Hukum Islam*, 18(2), 283–307.
- West, R. L., Turner, L. H., & Zhao, G. (2010). *Introducing communication theory: Analysis and application* (Vol. 2). McGraw-Hill New York, NY.
- Yin, R. K. (2009). *Case study research: Design and methods* / Robert K. Yin.